

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI (Studi Kajian Interelasi Dunia Pendidikan dengan Dunia Ekonomi)

Sri Yuliatwati

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UPN "Veteran" Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan - 12450
Telp. 021 7656971

Abstract

The role of micro, small and medium enterprises in the country's economy is very important and strategic for national development, because it has proven to be a post-crisis economic savior and become the largest provider of employment and highly contributes to the welfare of the community. The role of UMKM is very strategic, however, in order to face an increasingly open market mechanisms and competitiveness, the UMKM perpetrators must be able to control markets through a global business communications media so that UMKM can promote their business, access information on production, business transactions, and perform other business communication globally in order to expand its business network. Availability of a clear market for the products of UMKM is a prerequisite and a key success factor in improving competitiveness. Therefore, the perpetrators of UMKM should be able to utilize appropriate technology in various business activities. Meanwhile, the fundamental weaknesses faced by UMKM is the low quality of human resources capabilities of UMKM actors, especially in the acquisition and use of technology so that market orientation will be low, weak in a complex and sharp competition and inadequate marketing infrastructure. Therefore, in the empowerment of UMKM needed government partisanship and other relevant institutions in improving the quality of the actors the ability of UMKM in various business activities, helping to material capital, intellectual and institutional for UMKM to compete in the global marketplace by providing Web-based information technology facilities in every district or sub-districts throughout Indonesia, as well as realizing the economic system in favor of People's Economy.

Key Words: *competitive advantage, dependent demant product, material requirement planning, master production schedule, subcontracting*

PENDAHULUAN

Sejarah telah menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tetap dapat eksis dan berkembang, walau adanya krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997. Bahkan menjadi penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu sketsa perekonomian nasional pasca krisis ekonomi menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya harus bertumpu pada konglomerasi usaha besar,

melainkan UMKM yang merupakan Ekonomi Rakyat (ER) lebih efisien dan memiliki ketahanan yang lebih tangguh dibandingkan dengan Usaha Besar. Dengan demikian UMKM telah terbukti lebih mampu mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 2010 menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang diprogramkan. Selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2009 menginformasikan bahwa

seluruh pelaku usaha di Indonesia berjumlah 52.937.314 unit dan 99,67% di antaranya adalah UMKM. Peranan UMKM pun cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 96.211.332 orang atau 92,08% dari total penyerapan tenaga kerja nasional sebesar 104.485.450 orang. Sedangkan kontribusi terhadap PDB mencapai 56,70% atau Rp.1778,75 triliun, dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90% dari total nilai ekspor.

Data tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Dengan demikian peluang untuk mengembangkan UMKM di Indonesia potensial karena prospek bisnisnya masih tinggi. Oleh karena itu sudah waktunya diciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, komitmen ini tidak saja diperlukan kalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para pakar dan praktisi agar para pelaku UMKM mampu bersaing dalam pasar global. Namun sampai sekarang keberpihakan pemerintah masih belum optimal walau sebagian besar UMKM termasuk dalam katagori miskin dan berpendidikan rendah, demikian juga dalam kepemilikan aset.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal yang ingin diketahui dari tujuan kajian penulisan ini yaitu sebagai berikut: (1) Ingin mengetahui pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi; (2) Untuk mengetahui peluang dan kendala dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM; (3) Untuk merumuskan suatu kebijakan, dan menentukan strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian penulisan ini adalah survei. Metode survei ini digunakan untuk mengungkap tentang meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) karena sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu memotret kondisi dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi. Pengumpulan data dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu berupa referensi dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan data empirik diperoleh dari

hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang para pelaku UMKM. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara berisi indikator-indikator meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang memiliki arti strategis dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja serta penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam perkembangannya UMKM memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, di antaranya kualitas kemampuan SDM para pelaku UMKM masih rendah, terutama dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi modern, seperti : keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Selain itu para pelaku UMKM juga memiliki keterbatasan permodalan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Ditambah keterbatasan dalam mengakses informasi pasar dan sistem perekonomian yang belum berpihak pada ekonomi rakyat.

Bila dilihat secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran : (1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi; (2) Penyedia lapangan kerja terbesar; (3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; (4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta (5) Memberikan kontribusi terhadap PDB dan penerimaan devisa negara.

Rendahnya Kualitas SDM Para Pelaku UMKM

Data BPS (2009) menginformasikan bahwa pada tingkat nasional sebagian besar dari para pengusaha berpendidikan SD jumlahnya 65,3%, sedangkan yang berpendidikan SMP (18,7%), SMA (14,4%), Strata Satu (0,86%), dan di atas Strata Satu 0,38% dari total pengusaha yang tidak berbadan hukum. Sisanya memiliki gelar Sarjana muda/Diploma III dan dalam jumlah kecil berpendidikan lebih tinggi. Sedangkan Setiarso (2009), menjelaskan mengenai UMKM di

sektor industri pengolahan pangan (agroindustri) juga menunjukkan gambaran yang sama seperti di atas yaitu sebagian dari pengusaha kecil berpendidikan SD ke bawah hampir 80%, bahkan hampir 36% tidak tamat SD. Sedangkan pendidikan SMP, SMA (11,80%) dan DI, DII (7,55%) dan yang berpendidikan sarjana muda atau DIII ke atas kurang dari 1%.

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa pada umumnya para pelaku UMKM di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan rendah sehingga sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru. Oleh karena itu teknologi yang digunakan oleh para pelaku sektor UMKM dalam berbagai kegiatan usahanya masih bersifat tradisional, termasuk dalam produksi dan pemasaran. Dengan rendahnya kualitas kemampuan SDM para pelaku UMKM sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dalam kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan mengakses informasi, khususnya informasi pasar. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga jalannya lambat kalau tidak dikatakan stagnan. Padahal dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal pemasaran, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global.

Dalam banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adopsi Teknologi Informasi (TI) oleh UMKM masih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Menurut hasil studi lembaga riset AMI (*American Megatrends Incorporated*) Partners hanya 20% UMKM di Indonesia yang memiliki komputer. Selanjutnya dari hasil beberapa studi menjelaskan bahwa salah satu kendala yang serius yang dihadapi UMKM yaitu rendahnya kualitas SDM dalam produksi. Latar belakang pendidikan pengusaha pada umumnya masih rendah, sehingga sulit memahami atau menguasai teknologi yang diperlukan dan sulit menerima atau beradaptasi dengan proses pembaharuan akibat perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dari hasil beberapa studi ditemukan pula bahwa salah satu kendala yang dihadapi UMKM yaitu rendahnya kualitas SDM dalam produksi. Latar belakang

pendidikan pengusaha pada umumnya masih rendah, sehingga sulit memahami atau menguasai teknologi yang diperlukan dan sulit menerima atau beradaptasi dengan proses pembaharuan akibat perkembangan Iptek yang sangat cepat. Hanya sebagian kecil saja yang pernah mengikuti pelatihan teknis dan manajemen, padahal keberlangsungan aktivitas atau proses dalam pabrik, misalnya untuk membuat komponen otomotif, diperlukan suatu pelatihan yang merupakan suatu keharusan bagi perusahaan.

Dengan demikian SDM dan teknologi merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam membangun kesuksesan UMKM. Hal ini dapat kita lihat teknologi yang digunakan oleh para pelaku UMKM sebagai berikut: (1) Teknologi yang digunakan oleh para petani karet adalah teknologi penyiapan yang masih sangat sederhana yaitu penyiapan dilakukan terlalu dalam sehingga kayu karet rusak. Para petani belum memperhatikan mutu bahan, sehingga sering memasukkan bahan lain sebagai pemberat dan belum melakukan diversifikasi produk. (2) Teknologi pada pembuatan songket masih menggunakan alat sederhana yaitu gedogan, sehingga waktu produksi untuk 1 songket diselesaikan dalam waktu 3 minggu. (3) Teknologi yang digunakan pada pembuatan ukiran kayu masih sangat sederhana yaitu menggunakan pahat dan beberapa alat pembantu lainnya. Hasil ukiran masih kasar dan motif ukiran relatif statis. Selain itu pewarnaan masih belum sempurna dan adanya kesulitan mencari bahan kayu yang berstandar untuk diukir. (4) Teknologi yang digunakan dalam pembuatan kerupuk kemplang masih sederhana. Beberapa alat atau teknologi yang digunakan belum optimal dan masih mengandung beberapa kelemahan yaitu: pengadukan, pemotongan dilakukan dengan cara manual. Penjemuran dilakukan dengan menggunakan tenaga matahari, belum memperhatikan sanitasi, belum memahami penggunaan tambahan makanan.

Keterbatasan dalam Permodalan.

Hal yang paling dibutuhkan oleh para pengusaha kecil dan menengah adalah adanya bantuan modal berupa kredit lunak, agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Keterbatasan dalam permodalan dapat kita lihat data yang diinformasikan BPS (2009) bahwa 82,30% pengrajin merasa tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan untuk mendapatkan bantuan

modal perbankan dirasakan suku bunga masih tinggi sehingga kredit menjadi mahal. Informasi sumber pembiayaan dan persyaratan juga prosedur pengajuan kredit tidak jelas. Sistem dan prosedur kredit rumit dan lama serta waktu tunggu pencairan kredit yang tidak pasti. Perbankan juga kurang memberikan informasi tentang standar proposal pengajuan kredit sehingga para pengusaha kecil tidak mampu menyusun proposal sesuai kriteria perbankan. Dari pihak perbankan pun kurang memahami kriteria usaha kecil dalam menilai kelayakan usaha kecil sehingga jumlah kredit yang disetujui tidak sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Keterbatasan Dalam Mengakses Informasi Pasar UMKM

Beberapa keterbatasan yang dihadapi UMKM di antaranya keterbatasan mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis. Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka produk yang dihasilkan UMKM tidak dapat dipasarkan secara kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Untuk itu diperlukan peran dan partisipasi sebagai pihak terutama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kalangan Perguruan Tinggi serta instansi lain yang terkait agar membantu dan memfasilitasi akses informasi bagi para UMKM yang sebagian besar berada di daerah pedesaan atau kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia.

Sistem Perekonomian Belum Berpihak pada Ekonomi Rakyat.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam sistem perekonomian rakyat yaitu antara lain: (1) Sistem perijinan tidak transparan, mahal, berbelit-belit, diskriminatif, lama dan tidak pasti, serta terjadi tumpang tindih vertikal antara (pusat dan daerah) dan horizontal (antarinstansi di daerah); (2) Penegakan dan pelaksanaan hukum dan berbagai ketentuan cenderung kurang tegas; (3) Pengusaha kecil kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan tentang usaha kecil; (4) Pungutan atau biaya tambahan dalam pengurusan perolehan modal dari dana BUMN dan sumber lainnya cukup tinggi; (5) Banyak pungutan yang seringkali tidak disertai dengan pelayanan yang memadai; dan (6) Listrik, air dan telepon bertarif mahal dan sering mengalami gangguan, di samping pelayanan yang kurang baik,

Berdasarkan identifikasi pokok-pokok persoalan di atas, selanjutnya dapat dijelaskan pokok-pokok pemecahan persoalan dengan menerapkan kebijakan, strategi dan upaya sebagai berikut: (1) Terwujudnya UMKM yang memiliki SDM berkualitas, memiliki modal usaha yang memadai, dapat mengakses informasi pasar UMKM dengan mudah dan sistem perekonomian yang berpihak pada ekonomi rakyat, (2) Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas ditempuh beberapa strategi sebagai berikut: (a) meningkatkan kualitas SDM para pelaku UMKM, (b) meningkatkan permodalan para pelaku UMKM, (c) mempermudah dalam mengakses informasi pasar UMKM, dan (d) mewujudkan sistem perekonomian yang berpihak pada ekonomi rakyat.

Upaya meningkatkan kualitas SDM para pelaku UMKM, yaitu: (1) Pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM membentuk suatu lembaga khusus yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan UMKM, khususnya dalam hal peningkatan kualitas kemampuan SDM para pelaku UMKM. (2) Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait agar mendirikan balai pelatihan di sentra-sentra UMKM yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. (3) Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Perguruan Tinggi serta pihak-pihak lain yang terkait untuk memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat), kursus, penyuluhan, magang dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM dalam bidang pengetahuan kewirausahaan (*entrepreneurship*), sistem manajemen, penguasaan dan pemanfaatan teknologi modern, struktur organisasi, kultur/budaya bisnis, jaringan bisnis dengan pihak luar, serta keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM. (4) Pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan instansi terkait lainnya dalam mengembangkan kemitraan agar para pelaku UMKM dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh dari hasil pendidikan dan latihan, maupun kursus-kursus dan magang yang pernah diikutinya. (5) Pemerintah memberi kesempatan kepada para pelaku UMKM yang tangguh untuk mengikuti magang/studi banding di perusahaan-perusahaan tingkat nasional/internasional.

Upaya meningkatkan permodalan bagi para pelaku UMKM, yaitu: (1) Pemerintah membuat

kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat tanpa angunan, (2) Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepada UMKM untuk membantu permodalannya, baik melalui sektor jasa finansial formal maupun sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, *leasing* dan dana modal ventura, (3) Pemerintah, Pemda dan Instansi yang terkait memberikan rekomendasi kepada Bank untuk memberikan pinjaman permodalan bagi UMKM yang memiliki keunggulan untuk mengembangkan usahanya sehingga UMKM dapat berdaya saing di tingkat lokal, nasional maupun internasional, (4) Pemerintah perlu membentuk lembaga dan jaringan informasi kredit untuk meningkatkan akses UMKM kepada kredit perbankan. Lembaga ini apabila memungkinkan sekaligus dapat difungsikan sebagai lembaga penjamin untuk pinjaman yang lebih besar serta sebagai pusat informasi tentang calon-calon debitur dan jenis usahanya, (5) Bank-bank milik pemerintah, juga bank-bank komersial lainnya agar dapat memberikan pinjaman dan perpanjangan pinjaman kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih kompetitif sehingga dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memobilisasi modal awal dan modal kerja serta investasi jangka panjang dalam rangka memacu pertumbuhan usaha. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan di perbankan rasio kredit yang tercermin dari *non-performing loans* (NPL) UKM relatif cukup rendah, (6) Pemerintah mendirikan semacam "*small business integrated assistance control*" yang berfungsi sebagai pemberi jasa penyusunan sistem keuangan dan pembukuan bagi UMKM yang belum memiliki sistem yang memadai, (7) Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri serta instansi lain yang terkait untuk memberikan bantuan permodalan kepada para pelaku UMKM melalui program PNPM Mandiri, (8) Perbankan mempermudah persyaratan kepada UMKM untuk memperoleh pinjaman permodalan, (9) Perbankan memberlakukan bunga pinjaman lunak kepada UMKM yang memiliki asset sebagai jaminan pinjaman, (10) Pemerintah menyediakan dana bergulir bagi para pelaku UMKM yang ada, (11) Mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai penjamin kredit yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan, dan (12)

Bank Indonesia untuk meningkatkan akses kredit perbankan ke sektor riil adalah dengan memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit.

Upaya mempermudah dalam mengakses informasi pasar UMKM, yaitu: (1) Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Koperasi bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyediakan fasilitas teknologi informasi berbasis web yang dapat digunakan sebagai media komunikasi bisnis global di setiap daerah kabupaten atau kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, (2) Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian secara periodik memberikan informasi tentang pasar potensial untuk penjualan hasil produksi, (3) Pemerintah daerah harus lebih proaktif untuk melakukan peningkatan kapasitas penelitian/pengembangan pasar, mengingat salah satu masalah pemasaran yang serius dihadapi oleh UMKM adalah adanya keterbatasan pasar (*market constraints*), (4) Pemerintah melakukan peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasi, dan (5) Pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian memfasilitasi kegiatan pameran untuk promosi produk-produk UMKM agar mampu menembus pasar Internasional.

Upaya membentuk sistem perekonomian yang berpihak pada ekonomi rakyat, yaitu: (1) Pemerintah melakukan penyempurnaan Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dan koperasi, antara lain : RUU UMKM, RUU Perkoperasian, RUU Lembaga Keuangan Mikro, RUU penjaminan Kredit dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Lembaga Keuangan Mikro, (2) Pemerintah, Pemda dan lembaga terkait melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan perundangan yang kurang kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah, (3) Pemerintah melakukan penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/regulasi, (4) Pemerintah, Pemda dan lembaga terkait merealisasikan penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, (5) Pemerintah melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program

UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait, (6) Pemerintah, Pemda dan lembaga terkait membangun landasan legalitas usaha yang kuat dalam penyederhanaan birokrasi, prosedur perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk perijinan satu atap bagi UMKM. Keringanan pajak dalam kegiatan UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM, (7) Pemerintah, Pemda dan lembaga terkait memberikan pelayanan perijinan usaha secara gratis, sehingga UMKM akan terdorong untuk mendaftarkan usahanya. Mengingat persoalan inilah yang hingga kini masih banyak dikeluhkan oleh UMKM karena untuk memperoleh kredit formal diperlukan syarat administratif, di antaranya NPWP, SIUP, IMB, dan lain sebagainya, (8) Pemerintah mempermudah bantuan dalam pembuatan paten, sertifikasi ISO, *Special tax rate* pada pelaku UMKM, (9) Pemerintah memberikan kemudahan fasilitas dalam formalisasi badan Usaha, (10) Pemerintah dan lembaga terkait lainnya mengawasi dalam peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk dan jasa yang diperlukan, seperti : kemudahan perdagangan antar daerah dan pengangkutan, dan (11) Pemerintah dan lembaga terkait lainnya mengawasi peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program.

SIMPULAN

Dalam meningkatkan pemberdayaan para pelaku UMKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UMKM baik secara individu maupun kelompok.

Kendala yang paling banyak dihadapi para pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi adalah kemampuan SDM pengelola UMKM yang masih sangat terbatas pengetahuannya dan kemampuan ekonomi.

Pemanfaatan teknologi oleh para pelaku UMKM masih terbatas pada aplikasi perkantoran dasar untuk mendukung tugas-tugas administrasi. Sebagian besar UMKM telah menggunakan teknologi internet meskipun masih dalam tingkat dasar yaitu untuk komunikasi dengan pihak konsumen melalui email. UMKM yang menggunakan internet yaitu UKM yang

bergerak di sektor perdagangan perindustrian dan jasa. Penggunaan komputer terlihat sudah cukup tinggi di kalangan pengelola UMKM, khususnya untuk pembentukan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2009. *Perhitungan Kinerja UMK Ditinjau Dari Aspek Kontribusi Terhadap Berbagai Indikator Makro Ekonomi Serta Survei Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) UKM*. Jakarta : BPS.

BDS LPPM UNS. 2005. *Pasar Keuangan Mikro. Pelatihan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Bagi Bank Umum*. Buku Laporan: Kerjasama LPPM UNS dengan BI Kediri.

Hasan, Syariefuddin. 2010. *Koperasi dan UMKM Percepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Media Indonesia.

Ishak, Effendi. 2005. *Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM. Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: Geogole Shear.

Karsidi, Ravik. 2003. *Dari Petani Ke Pengrajin, Sebuah Studi Transformasi Pekerjaan*. Diterbitkan atas Kerjasama LPM UNS dengan Pustaka Cakra Surakarta.

Lembaga Ketahanan Nasional. 2010. *Lembar Penugasan Nomor: LP/61/VII/2010/Debidik*. Jakarta: Lemhannas RI.

Setiarso, Bambang. 2009. *Pengelolaan Pengetahuan: Knowledge-Management dan Modal Intelektual (Intellectual Capital) untuk Pemberdayaan UKM*. Jakarta: PDII. LIPI.